



**PERTUMBUHAN EKONOMI KESEMPATAN
DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SULAWESI
SELATAN PERIODE 1989-1995**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	04 09 97
Asal dari	FAK. Ekonomi
Banyaknya	1 Exp.
Harga	HADIAH.
No Inventaris	971509271
No. Klas	

OLEH

ANDI MAPPATOMPO

90 01 200

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1997

PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEMPATAN KERJA DAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN

PERIODE 1989-1995



OLEH

ANDI MAPPATOMPO

90 01 200

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin

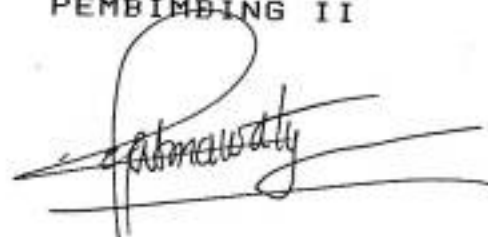
DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I



(Drs. A. KAHAR AKIL, MS)

PEMBIMBING II



(Dra. FATMAWATI, MS)

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut diucapkan selain puji syukur Kedadirat Allah S.W.T atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan satu tugas keilmuan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan kemampuan sehingga bentuk dan isi dari tulisan ini masoih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan-kekurangan sebagai suatu karya yang bersifat ilmiah. Namun, inilah hasil maksimal yang penulis dapat persembahkan. Oleh karena, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang bertujuan menyempurnakan skripsi ini, penulis sangat harapkan dengan segala kerendahan hati.

Disamping itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa berkat bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materil sehingga skripsi dapat terselesaikan. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda H.A. Badawi dan Ibunda H.A. Hatidjah (Alm) serta saudara-saudaraku yang tercinta, yang senantiasa memberikan dorongan dan pengorbanan yang tidak putus-putusnya,

sehingga dapat mengalami jenjang pendidikan dari awal sampai pada penyelesaian skripsi ini. Hanya do'a dan bakti yang dapat penulis persembahkan kepadanya atas segala pengorbanannya.

2. Bapak Drs. A. Kahar Akil, MS dan Ibu Dra. Fatmawati, MS masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II, atas kerelaan dan keikhlasannya yang tanpa pamrih dalam membimbing dan menasehati serta memberikan kesempatan kepada penulis ditengah-tengah kesibukannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak DR. Djabir Hamsah, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Drs. A. Kahar Akil, MS dan Bapak Drs. Hidayat Ely masing sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, yang telah menyetujui penulisan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, yang telah membekali penulis selama mengikuti kuliah.
6. Bapak pimpinan dan segenap karyawan Biro Pusat Statistik Sulawesi-Selatan .
7. Rekan-rekan di Kompleks Pondok Indah Jl. Andi Tonro V Blok A2/1B yang telah memberikan dorongan dalam penyusunan dan penyelesaian si

Akhirnya penulis mohon kehadiran Allah S.W.T., kepada mereka yang telah membantu penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini, semoga mendapat balasan yang berlipat ganda. Dan semoga penulis tetap diberikan keteguhan iman dalam mengembangkan amanah keilmuan ini.

Amiii..n!

Ujung Pandang , Juni 1997

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
4. Hipotesa	6
5. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	8
2.2. Teori-teori Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto	13
2.3. Pengertian Tenaga Kerja	19
2.4. Pengertian Elastisitas Tenaga Kerja	21
2.5. Distribusi Pendapatan Dalam Tinjauan Teori	24
BAB III METODOLOGI	29
3.1. Kerangka Konseptual	29

3.2. Jenis dan Sumber Data	31
3.2.1. Jenis Data	31
3.2.2. Sumber Data	31
3.3. Metode Pengumpulan Data	31
3.4. Metode Analisis	32
BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	36
4.1. Letak Geografis	36
4.2. Aspek Ekonomi	38
BAB V PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEMPATAN KERJA DAN DIS- TRIBUSI PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN PERODE 1989 - 1995	41
5.1. Analisa Pertumbuhan Ekonomi	41
5.2. Kesempatan Kerja	47
5.3. Distribusi Pendapatan	55
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	63
6.1. Kesimpulan	63
6.2. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
5.1. PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI SULAWESI SELATAN DAN INDONESIA TAHUN 1989 - 1995	44
5.2. PERKEMBANGAN PERDAPATAN PERKAPITA DI SULAWESI SELATAN DAN INDONESIA TAHUN 1989 - 1995 (Rp)	45
5.3. RATA-RATA PERTUMBUHAN RIIL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI SULAWESI SELATAN MENURUT SEKTOR EKONOMI TAHUN 1989, 1993 DAN 1995 (%)	48
5.4. RATA-RATA PERTUMBUHAN KESEMPATAN KERJA DI SULAWESI SELATAN MENURUT SEKTOR EKONOMI TAHUN 1989, 1993 DAN 1995 (%)	50
5.5. ELASTISITAS KESEMPATAN KERJA MENURUT SEKTOR EKONOMI DI SULAWESI SELATAN TAHUN 1989 - 1995 (%)	52
5.6. PERKEMBANGAN POLA PEMBAGIAN PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN TAHUN 1990 - 1995 (%)	57
5.7. GINIRASIO DI SULAWESI SELATAN TAHUN 1990-1995 (%)	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. KURVA LORENZ UNTUK SULAWESI SELATAN TAHUN

1990 - 1995

59



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Indonesia menyusun suatu program pembangunan nasional yang ditempuh dengan beberapa tahap pembangunan, dimana setiap tahap perencanaannya dikenal dengan REPELITA, yang sasarannya menitik beratkan pada bidang ekonomi, guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Jika melihat perkembangan REPELITA, maka pada pelita I dan II ditujukan untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, seperti yang dikemukakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa arah kebijaksanaan pembangunan nasional dibidang ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun disamping itu perhatian dan harapan yang tak kalah pentingnya adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sejak pelita III sampai pelita V gambaran ekonomi tertuju pada pemerataan dengan mengutamakan

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Tetapi bukan berarti mengabaikan tingkat pertumbuhannya dan disamping itu memperhatikan pula pemeratannya, maka tingkat pertumbuhan ekonomi senantiasa ditingkatkan terus agar tercipta keseimbangan antara laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya.

Dengan demikian sasaran umum pembangunan sejak pelita III berlandaskan pada "Triologi Pembangunan" dimana salah satu unsur dari triologi pembangunan tersebut adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Untu menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas pemerataan ini dituangkan dalam berbagai langkah dan kegiatan antara lain; melalui delapan jalur pemerataan, dan salah satu jalur pemerataan tersebut adalah pemerataan pembagian pendapatan.

Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Indonesia sampai pada Pelita V, cukup berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Apabila dibandingkan dengan negara-negara maju di masa lampau ketika mereka menghadapi keadaan ekonomi yang serupa, maka Indonesia berhasil melampaui prestasi mereka, dimana sampai Pelita V Indonesia telah mencapai rata-rata pertumbuhan \dot{G} NPAS \dot{G} NPAS bahkan tahun 1995 dapat mencapai 8%, ini berarti

pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 1995 secara makro berkembang cukup pesat.

Tentunya keberhasilan tersebut disertai pula dengan beberapa masalah. Oleh karena itu pembangunan jangan hanya dari segi pertumbuhannya saja, tetapi harus pula memperhatikan faktor-faktor lain seperti kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan, sebab walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami perkembangan tetapi jika tidak diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja atau bahkan kesempatan kerja tersebut mengalami penurunan, maka boleh dikatakan bahwa perkembangan ekonomi tersebut tidak terlalu berarti. Sebab walaupun pertumbuhan ekonomi dapat mengalami peningkatan akan tetapi jika pertambahan kesempatan kerja tetap sama atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan yang dicapai.

Oleh karena dalam proses tercapainya tujuan pembangunan tersebut, maka faktor-faktor yang berpengaruh harus mendapat perhatian agar supaya pertumbuhan yang diinginkan betul-betul dapat memaksimalkan pendapatan perkapita, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Namun perlu disadari bahwa pendapatan perkapita yang tinggi belum tentu merangsang masyarakat mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi pula. Karena



walaupun tingkat pendapatan perkapita cukup tinggi, tetapi tingkat pemerataan dalam pembagian pendapatannya rendah atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan cukup tinggi, maka justru akan menyimpang dari sasaran pembangunan yang diinginkan.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu propinsi yang terbesar di kawasan Indonesia bagian Timur, sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia, maka Sulawesi Selatan tidak bisa melepaskan diri dari segala kebijaksanaan di Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian corak dan pola pertumbuhan perekonomian di wilayah ini akan sama dengan corak dan pola pertumbuhan nasional. Maka di Sulawesi Selatan tujuan pembangunan bukan hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga meliputi penyediaan dan perluasan tenaga kerja. Di samping untuk memperkecil jurang pemisah antara golongan masyarakat yang kaya dan yang miskin, maka diperlukan pemerataan dalam pembagian pendapatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memilih judul "PERTUMBUHAN EKONOMI KESEMPATAN KERJA DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN".

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan maka masalah yang diajukan adalah :

1. Sejauh mana dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan pada tahun 1989 - 1995.
2. Bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai terhadap pendistribusian pendapatan di Sulawesi Selatan.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui dampak pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya kegunaan dari penulisan skripsi ini, adalah :

1. Dari hasil penelitian ini akan dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan.
2. Untuk dapat dijadikan bahwa referensi baik untuk penulis sendiri maupun orang lain dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dalam masalah yang berkaitan.

1.4. Hipotesis

Dalam usaha pemecahan masalah, maka diperlukan suatu hipotesis. Adapun hipotesa sebagai berikut :

1. Diduga pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesempatan kerja.
2. Di duga pula bahwa dengan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatanpun tidak timpang seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita.

1.5. Sistimatika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka sistimatika pembahasan dari seluruh isi skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : *PENDAHULUAN*

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, hipotesis dan sistimatika pembahasan.

BAB II : *TINJAUAN PUSTAKA*

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka konseptional mengenai apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan.

BAB III : *METODOLOGI*

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

1.4. Hipotesis

Dalam usaha pemecahan masalah, maka diperlukan suatu hipotesis. Adapun hipotesa sebagai berikut :

1. Diduga pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesempatan kerja.
2. Di duga pula bahwa dengan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatanpun tidak timpang seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita.

1.5. Sistimatika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka sistimatika pembahasan dari seluruh isi skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : *PENDAHULUAN*

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, hipotesis dan sistimatika pembahasan.

BAB II : *TINJAUAN PUSTAKA*

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka konseptional mengenai apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan.

BAB III : *METODOLOGI*

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

data dan metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DARI OBYEK PENELITIAN

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang analisis pertumbuhan ekonomi, analisis kesempatan kerja dan analisis distribusi pendapatan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bagian terakhir dari penulisan skripsi ini adalah merupakan bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Para ahli ekonomi telah memberikan pengertian pertumbuhan dengan konsep-konsep yang berbeda-beda namun pada dasarnya tujuannya adalah sama. Menurut M.L, Jhingan (1988 : 5 - 6), pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

"Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap, yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk perkembangan ekonomi dapat dipergunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendasari pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan dalam teknik produksi, masyarakat dalam lembaga-lembaga, perubahan tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi".¹

Pengertian diatas, dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui peningkatan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah/wilayah, apakah ada pertumbuhan struktur ekonomi/pola perekonomian disuatu daerah/wilayah. Pertumbuhan ekonomi terjadi dalam proses jangka panjang, yang secara berangsur-angsur bergerak atas terjadinya peningkatan pada tabungan, investasi dan konsumsi masyarakat, sehing-

1. M.L. Jhingan, 1988. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Rajawali Perss, Jakarta, hal. 5-6

ga makin meningkat pula pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah/wilayah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara atau daerah maka akan semakin mantap pula struktur perekonomian negara atau daerah tersebut.

Untuk itu maka M.L Jhingan lebih jauh menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untuk memantapkan struktur ekonomi suatu daerah atau negara dengan menjelaskan (1988 : 72) bahwa :

"Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi pada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan ideologi yang diperlukannya".²

Definisi diatas memberikan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi suatu bangsa nampak dengan adanya peningkatan persediaan barang dan jasa secara terus menerus. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi, sehingga akan mampu menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi berbagai produk yang dibutuhkan oleh penduduknya.

Kebijaksanaan pemerintah untuk membangun fasilitas (sarana dan prasarana) dimaksudkan untuk mewujudkan adanya perkembangan ekonomi yang membuka lapangan dan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya bagi sejumlah

2. Ibid, hal. 72



penduduk Indonesia. Dengan kesempatan kerja yang semakin besar, akan dapat menunjang dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan luasnya wilayah Indonesia dan terpisah-pisah itu maka terjadi ketidak seimbangan (inbalanced) pertumbuhan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Ada sebagian daerah yang sudah maju tetapi sebagian besar lainnya masih terbelakang, terutama daerah-daerah terpencil dan masih tergabung daerah baru. Dengan adanya ketidak seimbangan itu, maka apabila dilihat secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi rata-rata nampak perkembangannya.

Jadi sebenarnya pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan, baik dari daerah itu sendiri maupun dari luar daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat pula dipandang sebagai perluasan kesempatan kerja melalui perluasan elemen-elemen produktif yang dapat membuka kesempatan kerja.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Winardi (1983 : 331) yang menyebutkan bahwa :

"Pertumbuhan ekonomi (economic growth) dapat dipandang sebagai suatu proses ekspansi dan perbaikan elemen-elemen produktif dasar yaitu faktor-faktor produksi tenaga kerja, sumber-sumber alam, alat-alat serta benda-benda capital/modal"³

Pengertian diatas menunjukkan bahwa penyebaran dari

3. Winardi, Pengantar Ilmu Ekonomi, Edisi Ke Enam, hal.331.

pertumbuhan ekonomi itu adalah perluasan dan pengembangan dari sumber daya atau faktor-faktor produksi seperti, sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan keahlian. Keterpaduan dari pengelolaan faktor-faktor produksi tersebut, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pendapatan masyarakat.

Pengertian lain yang dikembangkan oleh Rostow sebagaimana dikutip oleh Sadono Sukirno :

"..... Bahwa pertumbuhan ekonomi tercipta sebagai akibat dari timbulnya perubahan-perubahan dari masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat moderen".⁴

Dari pengertian pertumbuhan ekonomi tersebut diatas, maka perubahan-perubahan yang terjadi akan menyebabkan antara lain :

1. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik dan sosial yang pada mulanya mengarah kepada suatu negara atau daerah menjadi berorientasi ke luar.
2. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi membatasi jumlah keluarga.
3. Perubahan dalam kegiatan penanaman modal masyarakat dari melakukan penanaman modal yang tidak -----
4. Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Kebijakan, Cetakan Ketiga, Medan, Bruta Gorat, 1981, hal. 17.

menjadi penanaman modal yang produktif.

4. Perubahan cara masyarakat dalam menentukan kedudukan keluarga atau suku bangsanya menjadi ditentukan oleh kesanggupan melaksanakan pekerjaannya.
5. Perubahan dalam pandangan masyarakat yang pada mulanya berkeyakinan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh keadaan alam sekitarnya dan selanjutnya berpandangan bahwa manusia harus memanipulasi keadaan alam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan atau perkembangan kegiatan ekonomi baik diukur dari pembangunan fisik, maupun diukur berdasarkan pendapatan domestik regional bruto.

Jadi pada dasarnya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat pula dilihat dari segi :

- a. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan jangka panjang atas kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu, dengan semakin meningkatnya volume tabungan masyarakat, konsumsi dan investasi, yang dapat mengimbangi bertambahnya jumlah penduduk dan angkatan kerja.
- b. Pertumbuhan ekonomi nampak dari segi kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk suatu negara atau daerah. Hal tersebut dapat dicapai berkat adanya perubahan atas kemajuan teknologi dan manajemen dalam mengelola

sumber daya alam, dan sumber daya manusia.

- c. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan kenaikan produk domestik bruto (PDB) untuk skala nasional dan produk domestik regional bruto (PDRB) untuk skala regional atau daerah tertentu dengan cara membandingkan PDB atau PDRB tahun sekarang dengan yang lalu.

2.2. Teori-teori Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

Dalam penyusunan dan Produk Domestik Regional Bruto ekonomi suatu negara atau daerah dapat dilihat pada pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita. Berhubung karena data yang tersedia di Sulawesi Selatan merupakan data yang disajikan dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi diwilayah ini akan digunakan data produk domestik regional bruto.

"Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan nilai akhir dari barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di suatu negara, atau produk domestik bruto adalah seluruh produk barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi diwilayah domestik suatu negara atau daerah dan biasanya dihitung dalam jangka waktu tertentu (satu

tahun)".⁵

Dengan demikian jumlah nilai dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh semua penduduk dalam satu tahun akan menunjukkan produk bruto di negara itu. Apabila produk bruto ini dihitung secara terus menerus dari waktu ke waktu, maka hasilnya akan dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.

Untuk menyusun dan menghitung Prouk Domestik Regional Bruto (PDRB), menggunakan teori-teori perhitungan pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu, metode perhitungan langsung dan tidak langsung sebagaimana yang dirumuskan Team Penyusun Perhitungan Pendapatan Regional Kotamadya Ujung Pandang (1990 : 4 - 5) sebagai berikut :

"1. Metode langsung terdiri atas tiga cara pendekatan :

- a). Pendekatan produksi, yaitu cara menghitung nilai tambah (value Added) dari semua sektor ekonomi yaitu 11 sektor, melalui pendekatan nilai produksinya. Nilai tambah diperoleh setelah mengeluarkan unsur-unsur

5. Rudiç dan Stanley Fisher, Macro Economic, 3rd Edition Massachusetts Institute of Technology, Mc Grow Hill Inc. Diterjemahkan oleh Rudi.p. Sitompul, Ed, Gunawan Hutahuruk, Erlangga, 1984, hal. 6.

- biaya (input antara) dari nilai produk brutonya.
- b). Pendekatan pendapatan, yaitu cara menghitung nilai tambah dengan jalan menjumlahkan seluruh balas jasa sektor produksi (sewa tanah, upah tenaga kerja, bunga/keuntungan dan sebagainya), karena ikut sertanya dalam proses produksi.
- c). Pendekatan pengeluaran, yaitu cara menghitung nilai tambah dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran atau jumlah dari penggunaan barang dan jasa (komoditi).
2. Metode tidak langsung, merupakan salah satu cara yang dipakai untuk menaksir nilai tambah, adalah dengan alokasi indikator tertentu sedemikian rupa sehingga nilai tambah suatu wilayah dapat diketahui. Metode ini dapat dipergunakan apa bila cara langsung tidak dapat sepenuhnya diterapkan".⁶

Pada dasarnya teori-teori yang dikemukakan diatas, bilamana diterapkan dalam perhitungan PDRB ruang lingkupnya hanya pada tingkat propinsi atau kabupaten/kotamadya. Akan tetapi metode yang paling sering

6. Team Penyusun dan Perhitungan Pendapatan Regional Kotamadya Ujung Pandang, 1990, hal. 4-5.

digunakan adalah metode perhitungan langsung melalui pendekatan produksi.

Pendekatan produksi dapat dihitung atas dasar harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, dan atas dasar harga konstan pada tahun tertentu misalnya harga konstan tahun 1987 dekade 1986 - 1990.

Kedua konsep perhitungan PDRB tersebut dijelaskan oleh Team Penyusunan Perhitungan Pendapatan Regional Kotamadya Ujung Pandang (1990 : 6) sebagai berikut :

- "1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku adalah sejumlah nilai barang dan jasa atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan (current price).
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, adalah sejumlah barang dan jasa atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga pada tahun tertentu (constant price)".⁷

Konsep-konsep perhitungan PDRB tersebut memerlukan data statistik yang akurat dari instansi yang berwenang dan akan diolah sedemikian rupa menurut rumus-rumus pertumbuhan/perkembangan riil PDRB, distribusi persentase PDRB, kontribusi PDRB, indeks perkembangan PDRB, indeks berantai PDRB, indeks implisit PDRB dan laju inflasi PDRB.

Dalam perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dibagi menjadi 11 sektor kegiatan ekonomi utama atau

7. Ibid. hal. 6.

lapangan usaha. Pembagian tersebut disesuaikan dengan rumus konsep perhitungan statistik pendapatan nasional di Indonesia yakni 11 sektor kegiatan ekonomi yang paling dominan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Sehubungan dengan itu Ace Partadiredja (1985 : 49) membagi sektor lapangan usaha sebagai berikut:

- "1. Pertanian, kehutanan, perikanan dan lain-lain
 - a. Tanaman bahan makanan
 - b. Tanaman perdagangan rakyat
 - c. Tanaman perkebunan
 - d. Peternakan dan hasil-hasinya
 - e. Hasil hutan
 - f. Hasil perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri
 - a. Perusahaan besar
 - b. Perusahaan sedang
 - c. Perusahaan kecil
4. Bangunan dan Konstruksi
5. Listrik, Gas dan air
6. Pengangkutan dan Komunikasi
 - a. Pengangkutan Kereta Api
 - b. Pengangkutan Darat
 - c. Pengangkutan Laut dan Udara
 - d. Pengangkutan Lainnya
 - e. Komunikasi
7. Perdagangan Besar dan Eceran
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lain
 - a. Bank
 - b. Koperasi Kredit
 - c. Asuransi
 - d. Lain-lainnya
9. Sewa Rumah
10. Pemerintah dan Pertahanan
11. Jasa-jasa lainnya",. ⁸

8. Ace Partadirdja, 1985, Perhitungan Pendapatan Regional Kotamadya Ujung Pandang, Cetakan Kedua, Jakarta : Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerapan Ekonomi dan Sosial, hal. 45

Penggolongan 11 sektor kegiatan ekonomi tersebut di atas, komposisinya disesuaikan dengan potensi daerah yang bersangkutan, seperti pada daerah yang hanya memiliki 9 atau 10 sektor lapangan usaha.

Berkaitan dengan itu, Team Penyusun Perhitungan Pendapatan Regional Kotamadya Ujung Pandang menyusun klasifikasi sektor sebagai berikut :

"Penggolongan sektor kedalam 9 sektor ekonomi, merupakan ketentuan baku dari NSA (System National Account), yang tercermin dalam 11 lapangan usaha. Kesebelasan sektor (lapangan usaha) tersebut adalah :

- 1). Sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
- 2). Sektor pertambangan/penggalian
- 3). Sektor industri/pengolahan
- 4). Sektor bangunan/konstruksi
- 5). Sektor listrik, gas dan air minum
- 6). Sektor perdagangan, restoran dan hotel, yang terdiri atas sub sektor perdagangan, sub sektor restoran dan sub sektor perhotelan.
- 7). Sektor angkutan dan komunikasi, yang terdiri atas sub sektir angkutan darat, laut, udara dan jasa angkutan, serta sub sektor komunikasi.
- 8). Sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, yang terdiri atas sub sektor lembaga keuangan lainnya.
- 9). Sektor sewa rumah".⁹

9. Team Penyusun dan Perhitungan Pendapatan Regional Kotamadya Ujung Pandang, 1990, hal 9.

2.3. Tenaga Kerja

Kegiatan manusia dalam melakukan industri dinamakan proses industri. Proses industri memerlukan faktor-faktor penunjang, sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya proses industri. Faktor-faktor penunjang proses industri dinamakan sumber daya ekonomi (faktor industri).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, menurut Arifinal Chaniago (1994, 45) yaitu :

"Faktor industri sumber daya tenaga kerja adalah sumbangan tenaga jasmani dan pikiran manusia yang beruna dalam proses produksi, misalnya, tenaga administrasi dan ahli teknik".¹⁰

Adapun faktor-faktor produksi tenaga kerja dibedakan menjadi :

1. Tenaga kerja jasmani, yaitu kegiatan manusia yang semata-mata mengandalkan tenaga fisik dalam kegiatan industri.

Tenaga kerja jasmani terdiri atas :

a. Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang telah menjalani pendidikan formal, misalnya monitor elektro, mesin, industri.

b. Tenaga terlatih, yaitu tenaga kerja yang telah berpengalaman dalam bidang pekerjaan tertentu, misalnya tukang batu tukang cukur, sopir.

10. Arifinal Chaniago, Ekonomi Produksi, Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu, Penerbit Angkasa Jakarta, 1994, hal 45.

c. Tenaga kerja tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan formal dan latihan tertentu, misalnya tukang pukul, penjaga gudang, buruh pelabuhan dan sopir angkutan kota/pedesaan.

Menurut Suroso (1994 : 62) pengertian tenaga kerja adalah sebagai berikut :

"Tenaga kerja manusia, baik jasmani maupun rohani yang digunakan dalam proses industri. Tenaga kerja juga disebut sumber daya manusia".¹¹

Tenaga kerja inilah yang menggarap sumber daya produksi alam. Dalam menggarap sumber daya industri alam, manusia tidak hanya menggunakan tenaga jasmani, melainkan juga tenaga rohani, kerja jasmani adalah kerja yang titik beratnya pada kegiatan badan.

2. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang titik beratnya pada kegiatan pikiran. Tentu saja ada pekerjaan yang harus diselesaikan dengan gabungan tenaga jasmani dan rohani.

Titik Suciati (1994 : 32) menyatakan bahwa :

"Faktor industri sumber daya manusia, baik sumber daya jasmani maupun rohani sangat menunjang kegiatan industri".¹²

11. Suroso, Ekonomi Produksi, Edisi Pertama, Penerbit Lumbung Agung, Bandung, 1994, hal. 62.

12. Titi Suciati, Ekonomi Produksi, Cetakan Pertama, Penerbit Lumbung Agung Bandung, 1994, hal. 32.

Kemudian Meity Wahyuni (1994 : 61) yaitu :

"Tenaga kerja manusia adalah suatu kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang ditujukan untuk kepentingan industri".¹³

2.4. Pengertian Elastisitas Tenaga Kerja

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir mencari kerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga walaupun mereka tidak bekerja mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.

Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan oleh batas umur. Tiap-tiap negara memberi batasan yang berbeda. India misalnya memberikan batasan umur 14 - 60. Jadi tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 14 - 60 tahun sedangkan yang berumur dibawah 14 tahun sampai 60 tahun digolongkan bukan tenaga kerja. Tujuan dari pada pemilihan batas umur tersebut adalah supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya.

Tenaga kerja atau man power terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bekerja, (2) golongan yang

13. Meity S. Wahyuni, Ekonomi Produksi, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Armici Bandung, hal. 61.

menganggur dan mencari pekerjaan, sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah, (2) golongan yang mengurus rumah tangga, (3) golongan lain-lain atau yang menerima pendapatan. Ketiga dalam golongan kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja oleh sebab itu kelompok ini sering juga dinamakan kelompok potensial labour force.

$$\text{Tenaga Kerja} = \text{Angkatan Kerja} + \text{Bukan Angkatan Kerja}$$

Besarnya penyediaan atau supply tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Di antara mereka sebahagian sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa. Mereka dinamakan golongan yang bekerja atau employed persons. Sebagian lain tergolong yang siap bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Mereka dinamakan mencari kerja atau pengangguran. Jumlah yang bekerja dan pencari kerja dinamakan angkatan kerja atau labour force.

$$\text{Penyediaan TK} = \text{Angkatan Kerja} = \text{Supply TK}$$

$$\text{Angkatan Kerja} = \text{Yang Bekerja} + \text{Penganggur}$$

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya

permintaan atau demand dalam masyarakat. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah.

Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja dinamakan pasar kerja. Seseorang dalam pasar kerja berarti dia menawarkan jasanya untuk produksi, apakah dia sedang bekerja atau mencari pekerjaan.

Perbedaan laju pertumbuhan pendapatan nasional dan kesempatan kerja tersebut dapat menunjukkan perbedaan elastisitas masing-masing sektor, untuk penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Besarnya permintaan perusahaan akan tenaga kerja pada dasarnya tergantung pada besarnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut. Fungsi permintaan ini biasanya didasarkan pada teori neo klasik mengenai marginal physical product of labour.

Berlawanan dengan fungsi penyediaan tenaga kerja, maka permintaan terhadap tenaga kerja berkurang bila ditingkat upah naik, Besarnya elastisitas tersebut tergantung pada (1) kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi lain, (2) elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan, (3) proporsi biaya

karyawan terhadap seluruh biaya produksi dan (4) elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lainnya.

Perubahan permintaan jangka panjang terhadap tenaga kerja dapat terjadi dalam bentuk loncatan atau shirf. Perubahan ini dapat diakibatkan oleh adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, peningkatan produktifitas kerja karyawan, dan perubahan dalam penggunaan teknologi dan metode produksi.


Secara makro, permintaan akan tenaga kerja dapat diperkirakan dengan mengetahui laju pertumbuhan dan daya serap masing-masing sektor ekonomi. Konsep elastisitas kesempatan kerja dapat digunakan untuk menyusun perkiraan kebutuhan tenaga kerja dan menyusun simulasi kebijaksanaan pembangunan untuk ketenagakerjaan.¹⁴

2.5. Distribusi Pendapatan Dalam Tinjauan Teori

Pada dasarnya tujuan pembangunan di setiap negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Banyak cara yang dilakukan untuk melihat apakah pembangunan yang telah dilakukan sudah mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

Tidak diragukan lagi bahwa bahwa pada REPELITA IV dan REPELITA V merupakan suatu periode pertumbuhan

14. Payaman J. Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, hal. 65.



ekonomi yang cukup pesat, tinggal masalahnya adalah bagaimana hasil-hasil pembangunan tersebut di distribusikan, serta dampak apa yang ditimbulkan pada tingkat hidup masyarakat khususnya masyarakat yang miskin.

Dari pengertian pertumbuhan ekonomi, maka laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diketahui dengan menghitung pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto dan pendapatan perkapita dari waktu ke waktu dalam jangka panjang. Namun perlu diingat bahwa, yang menjadi tolak ukur tingkat kemakmuran suatu negara, bukan hanya dapat dilihat pada tingkat kemakmurannya saja, tetapi juga perubahan dalam corak distribusi pendapatannya, seperti yang dikemukakan oleh H. Cheneri sebagai berikut:

"Pembangunan ekonomi tidak bisa diukur hanya semata-mata berdasarkan tingkat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau pertumbuhan pendapatan perkapita, tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana distribusi pendapatan diantara penduduk yaitu siapa sebenarnya yang memperoleh keuntungan dari pembangunan itu".¹⁵

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dapat digaris bawahi bahwa walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan, namun perlu diingat, pembangunan yang terlalu menekankan pada laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi belum tentu akan menjamin perluasan

15. M.P. Torado, Economic Development in the Third World, Longment, Inc, New York, Amerika Serikat, Diterjemahkan oleh Aminuddin dan Mursid, Ghalia Indonesia Cetakan Pertama, Februari 1983, hal. 69

pemerataan yang relatif lebih baik bagi penduduk di suatu negara atau daerah. Hal tersebut sejalan apa yang dikemukakan oleh The Kian Wie sebagai berikut :

"Menurut beberapa pengeritik pembangunan ekonomi bukan saja menyebabkan kenaikan dalam ketimpangan relatif, tetapi lebih parah lagi, membawa pula kemerosotan dalam tingkat hidup absolut dari golongan yang miskin atau pendapatan rendah. Dengan perkataan lain, bukan saja ketimpangan relatif akan tetapi juga kemiskinan absolut bertambah buruk akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat".¹⁶

Selanjutnya Kindleberger memberikan contoh pada negara "Kuwait" dan "Libya".¹⁷ Karena walaupun kedua negara itu telah mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita yang cukup tinggi pada negara itu belum dapat digolongkan sebagai negara maju. Sebab ciri-ciri perekonomian dan masyarakat negara-negara tersebut masih sangat mirip dengan yang dijumpai di negara-negara berkembang. Tentunya dalam hal ini terjadi ketimpangan-ketimpangan atau ketidak merataan tingkat pembagian pendapatan antara si kaya dan si miskin. Dengan kata lain yang kaya bertam-

16. Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan, Penyunting Thee Kian Wie, Jakarta, (Lembaga Penelitian Penerangan dan Pendidikan, Ekonomi dan Sosial LP3ES) 1981, hal. 3

17. Ch. P. Kindleberger, Economic Development, Mc. Grow Hill Book Co, Inc New York, 1956, hal. 3.

bah kaya dan yang miskin bertambah miskin".¹⁸ Ketimpangan-ketimpangan atau ketidak meratanya pembagian pendapatan yang terjadi. Oleh Samuelson dinyatakan sebagai berikut :

- "- Perbedaan dalam kekayaan
- Perbedaan dalam kemampuan masing-masing individu
- Perbedaan dalam pendidikan dan kesempatan
- Perbedaan dalam disparitis karena perbedaan kelas sosial.
- Perbedaan dalam unsur kesehatan."¹⁹

Dalam meninjau ketimpangan-ketimpangan pembagian pendapatan, terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan mutlak. Menurut M.S. Ahluwalia, distribusi pendapatan relatif atau jurang pembangunan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan, penggolongan ini didasarkan kepada besarnya pendapatan yang mereka terima. Sedangkan distribusi pendapatan mutlak atau jurang pembangunan mutlak adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu

18. Emil Salim. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan Cetakan Kedua; Jakarta, Yayasan Idayu, 1980, hal. 16.
19. Samuelson p.A. Economic an Introductory Analisis, New York, Mc Grow Hill, 1961. Disarikan kedalam Bahasa Indonesia oleh Paul Sitohang,

atau kurang dari padanya.²⁰

Untuk menggambarkan distribusi pendapatan relatif Bank Dunia digolongkan penerima pendapatan dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Kelompok penduduk dengan pendapatan rendah yang merupakan 40 persen jumlah penduduk termiskin.
- b. Kelompok penduduk dengan pendapatan sedang yang merupakan 40 persen dari jumlah penduduk berpendapatan menengah.
- c. Kelompok penduduk dengan pendapatan tinggi yang merupakan 20 persen dari jumlah penduduk terkaya atau berpendapatan tinggi.

Tingkat ketimpangan pembagian pendapatan yang dinikmati 40 persen penduduk dengan kelompok rendah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tingkat ketimpangan tinggi apabila 40 persen penduduk dalam kelompok rendah menerima lebih kecil dari 12 persen jumlah pendapatan.
- b. Tingkat ketimpangan sedang apabila 40 persen penduduk dalam kelompok rendah menerima antara 12 - 17 persen dari jumlah pendapatan.
- c. Tingkat ketimpangan rendah apabila 40 persen penduduk dalam kelompok menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan.

20. Sadono Sukirno, Op. cit, hal. 60 - 61.

BAB III

M E T O D O L O G I

3.1. Kerangka Konseptual

Pembangunan ekonomi menentukan maju mundurnya tingkat kegiatan masyarakat dalam produksi barang dan jasa. Selain itu jumlah penduduk yang semakin meningkat merupakan salah satu faktor produksi yang turut berperan dalam pembangunan, akan tetapi jika pertumbuhan penduduk yang cepat itu tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja, maka akan menambah jumlah pengangguran yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang kurang menguntungkan sebagai akibat dari penambahan penduduk atau tenaga kerja maka usaha-usaha pemerintah untuk menanggulangnya adalah dengan menggalakkan pembangunan khususnya ibidang ekonomi.

Untuk membahas lebih lanjut tentang permasalahan yang telah dikemukakan, maka perlu kiranya dipahami beberapa hal yang sehubungan dengan permasalahan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini perlu mendapatkan perhatian dan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Winardi (1983 : 331) bahwa :

"Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) dapat dipandang sebagai suatu proses ekspansi atau perbaikan elemen-elemen produksi dasar (yaitu faktor-faktor produksi tenaga kerja, sumber-sumber alam, alat-alat serta benda-benda kapital/modal.²¹

Selanjutnya tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi diartikan oleh : Payaman J. Simanjuntak (1985 : 2) bahwa :

"Tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga".²²

Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyatnya adalah dengan melihat perkembangan pendapatan perkapita dan bagaimana distribusinya diantara lapisan masyarakat sebab pembangunan ekonomi tidak dapat dikatakan berhasil jika tambahan pendapatan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir golongan masyarakat saja. Karena jika hal ini berlangsung terus menerus maka akan menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi antara lapisan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa kecemburuan sosial, yang jika tidak dicari jalan pemecahannya akan mengganggu stabilitas nasional.

21. Winardi, 1983, Pengantar Ilmu Ekonomi, Edisi Ke-enam, Tarsito, Bandung, hal. 331

22. Payaman J. Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Hal 2

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Dalam mengadakan penelitian dan pengamatan untuk pengujian hipotesis, maka penulis membagi dua data yang diperlukan, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.

1. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk time series dari tahun 1989 - 1995 terdiri dari data PDRB, PDB dan data tentang penduduk dan tenaga kerja di Sulawesi Selatan.
2. Data kualitatif yaitu data yang berupa teori dan tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

3.2.2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan dan Instansi terkait yang ada hubungannya dengan masalah kependudukan dan ketenaga kerjaan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk skripsi ini adalah :

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan tujuan mencari data-data dari obyek penelitian yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja di Sulawesi Selatan.

2. Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori untuk memperkuat penganalisaan dalam skripsi ini.

3.4. Metode Analisis

Dalam menganalisa data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengumpulkan dan menyusun data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan dan PDB Indonesia yang berasal dari semua sektor ekonomi Tahun 1989 - 1995.
- Adapun cara yang digunakan untuk mendapatkan laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan memakai rumus pertumbuhan rata-rata geometri sebagai berikut :

$$P_t = P_0 (1 + r)^t$$

Dimana :

- P_t = Nilai Produk Domestik Bruto pada tahun ke t
- P_0 = Nilai Produk Domestik Bruto pada tahun ke 0
- r = Angka pertumbuhan rata-rata tiap tahun

t = Banyaknya tahun dalam periode yang diperhitungkan.

- Data penduduk, angkatan kerja diperoleh dari survey penduduk antar sensus.
- ⊖ Untuk menghitung penyerapan tenaga kerja akan digunakan rumus elastisitas tenaga kerja sebagai berikut :

$$E_{TK_i} = \frac{N_i}{Y'_L} \quad 23$$

Dimana :

E_{TK_i} = Elastisitas tenaga kerja

N_i = Laju pertumbuhan kesempatan kerja

Y'_L = Laju pertumbuhan pendapatan nasional

- Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dapat digunakan beberapa cara yaitu :
 1. Aliran teori statistik
 2. Kelompok yang menyusun hukum-hukum distribusi pendapatan yang berlaku umum.
 3. Metode grafik.²⁴

23. Payaman J. Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Hal. 83

24. Henra Esmara, Pemikiran Pembagian Pendapatan di Indonesia (Padang, Lembaga Penelitian Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, 1975), hal. 9

- Dalam pembahasan ini digunakan metode Gini Ratio. Koefisien Gini atau Gini Konsentrasi adalah merupakan persamaan ukuran ketimpangan yang bervariasi dari nol (merata sempurna) sampai satu (ketimpangan yang sempurna).

Dalam mengestimasi persamaan koefisien Gini ini digunakan Kurva Lorenz sebagai penunjang. Gedung kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif yang sebenarnya antara persentase jumlah penerima penghasilan (penduduk) dan persentase jumlah penghasilan yang mereka terima dalam jangka waktu tertentu (sama tahun).²⁵

- Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n \frac{P_i (Q_i + Q_{i-1})}{10.000} \quad 26$$

Dimana :

P_i = Persentase ^{PENDUDUK} kumulatif penerima penghasilan pada kelas pendapatan ke i .

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan

-
25. Michael P. Toronda, *Economic Development in the Third World*, Alih Bahasa, Aminuddin dan Mursid, Ghalia Indonesia Cetakan 1, Pebruari 1983, hal. 12
26. Team Analisa Data SUSENAS, *Distribusi Pendapatan di Indonesia*, BPS Jakarta 1993, hal.12.

kelas ke i .

G_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke $i-1$.

n = Banyaknya kelas.

Kurva Lorenz dengan menggunakan data decile kita membagi kedua sumbu horisontal dan vertikal menjadi sepuluh segmen yang sama, sesuai dengan masing-masing sepuluh kelompok decile itu. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin besar tingkat ketimpangan yang terjadi. Sebaiknya, semakin dekat pada garis horisontal, maka semakin dekat pada horisontal, maka ketimpangan semakin kecil.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Letak Geografis

Propinsi Sulawesi Selatan terletak diperbatasan antara Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur dengan luas wilayah 63.482,54 km². Di sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara, disebelah Selatan dengan laut Flores, dan disebelah Barat berbatasan selat Makassar.

Propinsi ini dibentuk berdasarkan Perpu No.2 Tahun 1962 dan diundangkan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1964 sebelum terbentuknya propinsi ini, propinsi Sulawesi Selatan menyatu dengan propinsi Sulawesi Tenggara. Secara administratif propinsi Sulawesi Selatan dibagi menjadi 21 Kabupaten dan 2 Kotamadya dengan 183 kecamatan dan 2.078 desa atau kelurahan (1.604 definitif dan 473 persiapan).

Dengan dasar pertimbangan ekonomi, letak geografis dan latar belakang budaya daerah maka Sulawesi Selatan yang terdiri dari 23 daerah tingkat II ini dibagi menjadi 5 Sub Wilayah Pembangunan (SWP). Kelima wilayah pembangunan tersebut masih tetap bertumpuk pada sektor pertanian yang merupakan andalam utama.

Sub Wilayah Pembangunan Sulawesi Selatan tersebut meliputi :

1. Sub Wilayah Pembangunan Bagian Selatan meliputi Kotamadya Ujung Pandang, kabupaten Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba dan Selayar dengan pusat pembangunannya di Kotamadya Ujung Pandang. Kegiatan-kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pemerintahan, pendidikan, perindustrian, perdagangan dan pertanian tanaman pangan.
2. Sub Wilayah Pembangunan Bagian Timur meliputi Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai dengan pusat pembangunannya Watangpone. Kegiatan-kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
3. Sub Wilayah Pembangunan Bagian Tengah meliputi Kotamadya Pare-pare, kabupaten Barru, Pinrang, Sidrap dan Enrekang dengan pusat pengembangan di Pare-pare. Kegiatan-kegiatan utama yang dikembangkan adalah meliputi pertanian, perdagangan perikanan dan perkebunan.
4. Sub Wilayah Pembangunan Bagian Utara meliputi kabupaten Luwu dan Tana Toraja dengan pusat pengembangannya di Palopo, akan dikembangkan dengan kegiatan utamanya adalah pertanian, perkebunan, peternakan dan pertambangan.
5. Sub Wilayah Pembangunan Bagian Barat meliputi kabupaten Majene, Polewali Mamasa dan Mamuju dengan pusat

pengembangannya di Majene, akan dikembangkan dengan kegiatan utamanya adalah perdagangan, perikanan pertanian dan industri kerajinan.

4.2. Aspek Ekonomi

Sampai dengan akhir Pelita IV, sasaran kebijaksanaan pembangunan Sulawesi Selatan masih diarahkan pada pembangunan bidang ekonomi khususnya pada sektor-sektor yang dapat mendorong tingkat pertumbuhan yang tinggi serta menyerap banyak tenaga kerja. Selama Pelita IV, pertumbuhan ekonomi daerah ini yang ditargetkan minimal sebesar 6,5 persen pertahun, ternyata dapat mencapai rata-rata 6,64 persen pertahun. Hal tersebut dapat dicapai karena pertumbuhan yang cukup tinggi dari berbagai aspek ekonomi antara lain sektor pertanian dengan peningkatan rata-rata 4,3 persen per tahun, sektor pertambangan 12 persen, sektor industri pengolahan 10,72 persen, sektor angkutan dan komunikasi 9,22 persen dan sektor pembangunan 10,9 persen per tahun. Jadi walaupun peranan sektor pertanian tetap, namun terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor pertanian menuju pada keseimbangan struktur ekonomi.

Sejalan dengan pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita penduduk juga mengalami peningkatan. Selama Pelita IV, angka kenaikan pendapatan perkapita mencapai rata-rata 11,33 persen per tahun, yaitu dari Rp. 249.192

pada tahun 1983 menjadi Rp. 548.569 pada tahun 1990. Sedang untuk periode 1983 - 1990 kenaikan rata-ratanya mencapai 11,39 persen pertahun.

Di lihat dari strukturnya, perekonomian Sulawesi Selatan masih menunjukkan corak agraris. Dominasi sektor pertanian kelihatannya masih mewarnai komposisi PDRB daerah ini. Bahkan sektor ini masih diharapkan sebagai sektor andalan pelita mendatang.

Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga konstan yang pada tahun 1983 sebesar Rp. 44,45 persen pada tahun 1990 sedikit menuju menjadi 43,70 persen. Sementara itu sektor industri pengolahan yang biasanya digunakan sebagai tolak ukur untuk perkembangan ekonomi masih kecil peranannya. Sampai dengan akhir Pelita IV, sumbangan sektor industri pengolahan terhadap PDRB dan PDB baru mencapai sekitar 6,5 persen.

Dilihat dari arah perkembangan sektor-sektor ekonomi terlihat adanya perubahan yang mengarah pada struktur yang lebih berimbang. Sektor-sektor primer yang pada mulanya peranannya cukup besar secara perlahan-lahan menunjukkan penurunan. Sementara itu, sektor-sektor sekunder dan tertier yang pada mulanya relatif kecil peranannya semakin mengalami peningkatan. Seperti sektor industri pengolahan, listrik dan air, bangunan, bank dan lembaga keuangan, kontribusinya terhadap PDRB menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat.

Dilihat dari tingkat pertumbuhan secara sektoral sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air nampaknya memberikan prospek yang baik. Kedua sektor ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pertumbuhan riil sektor industri pengolahan mencapai rata-rata 14,10 persen per tahun, sedang sektor listrik, gas dan air tingkat pertumbuhannya mencapai rata-rata 11,71 persen per tahun. Pertumbuhan yang pesat pada kedua sektor tersebut memungkinkan untuk dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain yang terkait seperti perdagangan, angkutan dan komunikasi, lembaga keuangan dan pertanian.

Dilihat dari segi stabilitasnya, situasi perekonomian di Sulawesi Selatan kelihatannya cukup mantap. Hal ini terlihat dari dua indikator stabilitas yang penting, yaitu perkembangan indeks harga 9 bahan pokok dan perkembangan indeks harga konsumen yang dikenal dengan tingkat inflasi.

BAB V
PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEMPATAN KERJA
DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN
PERIODE 1989 - 1995



5.1. Analisa Pertumbuhan Ekonomi

Telah dijelaskan pada Bab I bahwa, jumlah nilai dari barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh semua penduduk dalam suatu wilayah, akan menunjukkan produk bruto di wilayah tersebut. Apabila produk bruto ini di hitung secara terus-menerus (dalam satu tahun ke tahun tertentu), maka hasilnya akan dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Untuk mengetahui apakah suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi, maka perlu ditentukan perubahan-perubahan yang sebenarnya berlaku dalam kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk mencapai tujuan ini pengaruh perubahan harga terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pada beberapa tahun perlu dihapuskan. Hal ini dilakukan dengan menghitung produk domestik bruto menurut harga tetap. Oleh karenanya, pengertian produk domestik bruto dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu produk domestik bruto menurut harga berlaku dan produk domestik bruto menurut harga tetap (konstan).

Produk domestik bruto menurut harga tetap (konstan) dapat dihitung dengan jalan mendepresiasi produk domestik regional bruto menurut harga berlaku, yakni menilainya kembali berdasarkan pada harga-harga tahun dasar (base year).

Dengan mengetahui produk domestik regional bruto menurut harga tetap dari tahun ke tahun, maka untuk menghitung pendapatan perkapita menurut harga tetap (konstan) bukan merupakan masalah lagi. Pendapatan perkapita menurut harga tetap (konstan) dilakukan dengan jalan membandingkan produk domestik regional bruto menurut harga konstan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama.

Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) hal ini kita dapat lihat pada Tabel 5.1 kolom (2) dan (3). Tingkat pertumbuhan rata-rata produk bruto dari tahun 1989 sampai tahun 1995 di Sulawesi Selatan menunjukkan angka kenaikan riil di atas tingkat pertumbuhan Nasional. Dimana menunjukkan angka rata-rata 7,90%. Sedangkan untuk seluruh Indonesia menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,14%, lihat Tabel 5.1 kolom (3) dan (5).

Sedangkan angka pertumbuhan untuk setiap tahunnya yaitu ; pada tahun 1990 tingkat pertumbuhan ekonomi

Sulawesi Selatan sebesar 6,74%, tahun 1991 sebesar 9,53%, kemudian pada tahun 1992 naik menjadi 7,74%, selanjutnya pada tahun 1993 turun menjadi 7,72%, Tahun 1994 sebesar 7,67% dan Tahun 1995 naik menjadi 8,02%. Lihat Tabel 5.1 kolom (3).

Sementara untuk Indonesia pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun pada periode ini adalah sebagai berikut : pada tahun 1990 tingkat pertumbuhannya sebesar 7,24%, Tahun 1991 sebesar 6,90%, Tahun 1992 sebesar 6,26% Tahun 1993 sebesar 6,88%, kemudian pada tahun 1994 sebesar 7,74% dan pada tahun 1995 sebesar 8,07%. Lihat Tabel 5.1 kolom (5).

Pertumbuhan tertinggi di Sulawesi Selatan terjadi pada tahun 1991 dan pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 1990. Bila melihat perentasinya maka pluktuasinya menunjukkan antara 9,53% dan 6,74%, sedangkan secara Nasional angka kenaikan dari tahun ke tahun menunjukkan variasi yang lebih rendah yaitu 8,07% dan 6,26%.

TABEL 5.1

PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
SULAWESI SELATAN DAN INDONESIA TAHUN 1989 - 1995

Tahun	Sulawesi Selatan		Indonesia	
	Nilai *) Konstan 83	% **) Kenaikan	Nilai *) Konstan	% **) Kenaikan
1989	2608,66	-	107436,60	-
1990	2784,60	6,74	115217,30	7,24
1991	3049,87	9,53	123164,80	6,90
1992	3286,07	7,74	130908,80	6,26
1993	3539,80	7,72	139915,32	6,88
1994	3811,31	7,67	150366,10	7,47
1995	4116,97	8,02	162500,63	8,07
Rata-Rata 1989 - 1995	X	7,90	X	7,14

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan
*) Nilai dalam milyar rupiah
**) Hasil Pengolahan Penulis

Kemudian tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini:

TABEL 5.2

PERKEMBANGAN PENDAPATAN PERKAPITA DI SULAWESI SELATAN
DAN INDONESIA TAHUN 1989 - 1995
(DALAM RUPIAH)

Tahun	Sulawesi Selatan		Indonesia	
	Nilai *) Konstan 83	% **) Kenaikan	Nilai Konstan 83	% **) Kenaikan
1989	342049	-	517177	-
1990	360159	5,29	545720	5,52
1991	389819	8,23	572420	4,89
1992	415810	6,67	595449	4,02
1993	443009	6,54	623441	4,70
1994	466621	5,33	659601	5,60
1995	495085	6,10	698517	6,90
Rata-Rata 1989 - 1995	X	6,35	X	5,14

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan
**) Hasil Pengolahan Penulis

Pada Tabel 5.2 diatas dapat dilihat perkembangan pendapatan perkapita di Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 1989 - 1995. Tingkat pertumbuhan rata-rata pada periode tersebut diatas, tidak jauh berbeda dengan tingkat pertumbuhan produk domestik regional brutonya. Pertumbuhan Sulawesi Selatan menunjukkan angka rata-rata di atas tingkat pertumbuhan nasional, yaitu untuk Sulawesi

Selatan angka rata-ratanya sebesar 6,35% sedangkan untuk seluruh Indonesia angka rata-ratanya sebesar 5,14%. Lihat Tabel 5.2 kolom (3) dan (5).

Sedangkan angka pertumbuhan tiap tahunnya adalah sebagai berikut; pada tahun 1990 tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita Sulawesi Selatan sebesar 5,29%, tahun 1991 sebesar 8,23%, tahun 1992 sebesar 6,67% kemudian tahun 1993 sebesar 6,54%, tahun 1994 5,33%, dan tahun 1995 sebesar 6,10%. Untuk Indonesia berturut-turut dari tahun 1990 - 1995 adalah sebagai berikut; 1990 sebesar 5,52%, tahun 1991 sebesar 4,89%, tahun 1992 sebesar 4,02%, tahun 1993 sebesar 4,70%, tahun 1994 sebesar 5,60%, kemudian 1995 sebesar 6,90%. Lihat Tabel 5.2 kolom (3) dan (5).

Sama halnya dengan kenaikan produk Domestik Bruto, kenaikan pendapatan perkapita yang tertinggi untuk Sulawesi Selatan terjadi pada tahun 1991 dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 1990. Bila kita melihat tingkat pareasinya, untuk Sulawesi Selatan memperlihatkan angka pruktiasi antara 8,23% dan 5,29%, sedangkan untuk Indonesia angka kenaikan dari tahun ke tahun memperlihatkan tingkat pareasi yang lebih rendah yaitu antara 6,90% pada tahun 1995 dan 4,02% pada tahun 1992.

5.2. Kesempatan Kerja

Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi yang telah di capai itu dapat meningkatkan kesempatan kerja maka dalam bagian ini akan dianalisa mengenai kesempatan kerja dengan berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pengukuran terhadap pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja ini akan diukur dengan angka elastisitas kesempatan kerja. Perhitungan elastisitas kesempatan kerja ini dilakukan pada setiap sektor ekonomi, agar nampak jelas adanya kesempatan kerja pada masing-masing sektor ekonomi tersebut.

Adapun data mengenai pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan menurut sektor Ekonomi adalah sebagai berikut :

TABEL 5.3

RATA-RATA PERTUMBUHAN RILL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
SULAWESI SELATAN MENURUT SEKTOR EKONOMI TAHUN
1989, 1993, DAN 1995 (%)

Lapangan Usaha *)	Persentase			Laju Pertumbuhan 1989 - 1995
	1989	1993	1995	
1. Pertanian	43,57	38,15	37,03	22,01
2. Pertambangan, galian	2,34	3,19	3,46	34,75
3. Industri pengolahan	7,53	11,62	11,91	37,39
4. Listrik, gas dan air	1,19	0,97	1,02	22,82
5. Bangunan, konstruksi	3,81	5,77	5,73	35,48
6. Perdagangan, restoran, hotel	17,02	16,19	16,10	23,97
7. Angkutan dan komunikasi	9,09	5,76	6,41	15,74
8. Bank dan Lembaga keuangan lain	5,99	6,15	6,12	26,75
9. Jasa-Jasa	11,56	12,19	12,24	29,34
Rata ² Pertumbuhan	6,48	7,72	8,02	7,90

Sumber : Kantor Statistik Sulawesi Selatan

Apabila diperhatikan rata-rata tingkat pertumbuhan selama periode 1989 - 1995 maka pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yaitu dengan angka rata-rata sebesar 37,39% pertahunnya, kemudian berturut-turut diikuti oleh sektor bangunan dan konstruksi dengan angka pertumbuhan sebesar 35,48% pertahun, sektor pertambangan dan galian dengan pertumbuhan rata-rata 34,75% pertahun, sektor jasa-jasa dengan pertumbuhan rata-rata 29,34% pertahun, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya dengan pertumbuhan rata-rata 26,75% pertahun, sektor perdagangan restoran dan hotel dengan pertumbuhan rata-rata 23,97% pertahun, sektor listrik, gas dan air dengan pertumbuhan rata-rata 22,82% pertahun, sektor pertanian dengan pertumbuhan rata-rata 22,01% pertahun dan sektor angkutan dan komunikasi sebesar 15,74% pertahun. Dengan demikian rata-rata tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sulawesi Selatan selama periode tersebut adalah sebesar 7,90% per tahun (lihat Tabel 5.3).

Sebelum menghitung tingkat penyerapan tenaga kerja terlebih dahulu akan dilihat perkembangan tenaga kerja menurut sektor ekonomi di Sulawesi Selatan pada Tabel berikut :

TABEL 5.4

RATA-RATA PERTUMBUHAN KESEMPATAN KERJA DI
SULAWESI SELATAN MENURUT SEKTOR EKONOMI TAHUN
1989, 1993, DAN 1995 DALAM (%)

Sektor Ekonomi	Persentase			Laju Pertumbuhan 1989 - 1995
	1989	1993	1995	
1. Pertanian	58,94	58,53	58,56	2,99
2. Pertambangan, dan galian	0,09	0,46	0,46	44,13
3. Industri Pengolahan	12,87	9,89	9,88	-2,14
4. Listrik, gas dan air	0,05	0,18	1,18	33,90
5. Bangunan, konstruksi	0,87	2,90	2,90	31,21
6. Perdagangan, restoran, hotel	12,00	12,85	12,88	4,83
7. Angkutan dan komunikasi	2,64	3,04	3,02	6,05
8. Bank dan Lembaga keuangan lain	0,38	0,24	0,24	-5,49
9. Jasa-Jasa	11,10	11,91	11,91	4,22
Rata ² Pertumbuhan	3,14	0,74	0,74	3,13

Sumber : Kantor Statistik Sulawesi Selatan

Apabila dilihat rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja bekerja periode 1989 - 1995, maka pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan galian dengan tingkat rata-rata pertumbuhan sebesar 44,13% pertahun, kemudian berturut-turut sektor listrik gas dan air dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33,90% pertahun sektor bangunan dan konstruksi 31,21% pertahun, sektor angkutan dan komunikasi 6,05% pertahun, sektor perdagangan restoran dan hotel sebesar 4,83% pertahun, sektor jasa-jasa sebesar 4,22% pertahun, sektor pertanian sebesar 2,99% pertahun, sektor industri pengolahan sebesar 2,14% pertahun dan sektor bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar 5,49% pertahun. Dengan demikian rata-rata tingkat pertumbuhan kesempatan kerja pada periode 1989 - 1995 di Sulawesi Selatan adalah sebesar 3,13% pertahun (lihat Tabel 5.4).

Dalam menghitung tingkat penyerapan tenaga kerja akan digunakan elastisitas tenaga kerja. Disini akan dilihat apakah sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi juga mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi pula. Dalam perhitungan elastisitas tenaga kerja di gunakan tingkat pertumbuhan kesempatan kerja rata-rata pertahun.

Dengan berdasarkan pada hal tersebut maka elastisitas kesempatan kerja selama periode 1989 - 1995 yang diamati adalah sebagai berikut :

TABEL 5.5

ELASTISITAS KESEMPATAN KERJA MENURUT SEKTOR EKONOMI
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 1989 - 1995 DALAM (%)

No.	Sektor Ekonomi	Laju Pertumbuhan		Elastisitas tenaga Kerja
		PDB	T. Kerja	
1.	Pertanian	22,01	2,99	0,14
2.	Pertambangan dan galian	34,75	44,13	1,27
3.	Industri pengolahan	37,39	-2,14	-0,06
4.	Listri gas dan air	22,82	33,90	1,48
5.	Bangunan dan konstruksi	35,48	31,21	0,88
6.	Perdagangan, restoran dan Hotel	23,97	4,83	0,20
7.	Angkutan dan komunikasi	15,74	6,05	0,38
8.	Bank dan lembaga keuangan lainnya	26,75	-5,49	-0,20
9.	Jasa - jasa	29,34	4,22	0,14
TOTAL PERTUMBUHAN		7,90	3,13	0,39

Sumber : Hasil Pengolahan

Dari hasil perhitungan (lihat Tabel 5.5) ternyata elastisitas kesempatan kerja tertinggi terdapat pada sektor listrik, gas dan air yaitu sebesar 1,48%. Ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen Produk Domestik Bruto di sektor ini akan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1,48% selanjutnya di ikuti oleh sektor pertambangan sebesar 1,27%. Tingginya elastisitas tenaga kerja pada sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan sektor Pertambangan dan Penggalian disebabkan karena selama tahun 1989-1995 tenaga kerja yang terserap mengalami pertumbuhan yang cukup besar yaitu sebesar 33,90 % untuk sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan 44,13% untuk sektor pertambangan dan Penggalian. Sedangkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutonya sebesar 22,82% untuk sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan 34,75% untuk sektor Pertambangan dan penggalian. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor ini di sebabkan karena sektor ini masih cenderung berkembang sebagai sektor yang padat karya dan juga sektor ini tidak terlalu menuntut keahlian dan keterampilan dari para pencari kerja. Berturut-turut di ikuti oleh sektor Bangunan dan konstruksi sebesar 0,88%, sektor angkutan dan komunikasi sebesar 0,38%. Sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 0,20%, sektor jasa-jasa sebesar 0,14%, sektor pertanian sebesar 0,13%, sektor industri pengolahan sebesar -0,06%, dan sektor bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar -0,20%.

Rendahnya elastisitas kerja pada sektor Industri Pengolahan dan sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya di sebabkan karena selama tahun 1989-1995, tenaga kerja yang terserap mengalami pertumbuhan yang sangat rendah yaitu -2,14% untuk sektor Industri Pengolahan dan -5,49% untuk sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Sedangkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutonya sebesar 37,39% untuk sektor Industri Pengolahan dan 26,75% untuk sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor ini di sebabkan karena kedua sektor ini berkembang sebagai sektor yang padat modal dan juga sektor ini memerlukan atau menuntut keahlian dan keterampilan dari para pencari kerja.

Secara keseluruhan elastisitas tenaga kerja di Sulawesi Selatan adalah sebesar 0,39% yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persen Produk Domestik Bruto di Sulawesi Selatan akan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 0,39%.

5.3. Distribusi Pendapatan

Pada sub bagian yang terdahulu dalam bab ini telah dijelaskan tentang tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai di Sulawesi Selatan. Melihat uraian tersebut, maka hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai cukup berarti bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Namun perlu diingat bahwa walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan, tetapi pertumbuhan tersebut tidak menciptakan corak distribusi pendapatan seperti yang diharapkan, maka sebagai pelengkap pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai pemerataan pembagian pendapatan dalam proses pembangunan di Sulawesi Selatan.

Masalahnya adalah sampai sejauh mana pemerataan harus dilakukan sehingga dikatakan bahwa suatu daerah atau negara sudah berhasil dalam pemerataan pembagian pendapatan bagi setiap anggota masyarakatnya, kemudian bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung di Sulawesi Selatan. Apakah dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat sekaligus menghilangkan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi.

Ut untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan dipakai indeks Gini atau Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia. Gini Rasio adalah suatu ukuran yang berlaku umum, yang biasanya di kombinasikan dengan Kurva Lorens. Nilai Gini Rasio berkisar antara nol dan satu. Apabila nilai Gini Rasio nol, maka hal tersebut menunjukkan adanya

pemerataan yang sempurna, sedangkan nilai Gino Rasio satu menunjukkan adanya ketimpangan total.

Bank dunia telah menggolongkan penduduk menjadi tiga golongan yaitu 40% penduduk berpenghasilan rendah, 40% penduduk berpenghasilan menengah, dan 20% penduduk yang berpenghasilan tinggi. Ukuran pemerataan pendapatan terfokus pada 40% kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah. Apabila kelompok ini menerima kurang dari 12% dari total pendapatan. Maka terjadi ketimpangan tinggi, apabila menerima 12 - 17% dari total pendapatan maka terjadi ketimpangan sedang, dan apabila menerima lebih dari 17% dari total pendapatan, maka dikategorikan ketimpangan rendah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa ketimpangan pembagian pendapatan di Sulawesi Selatan masih tergolong dalam ketimpangan rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pola distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan berikut ini.



TABEL 5.6
PERKEMBANGAN POLA PEMBAGIAN PENDAPATAN DI
SULAWESI SELATAN TAHUN 1990, 1993, 1995 (%)

TAHUN	40 % Rendah	40 % Sedang	20 % Tinggi	Tingkat Ketimpangan
1990	22,10	38,38	39,52	Rendah
1995	22,65	39,68	37,67	Rendah

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 1990, sebanyak 40% penduduk berpendapatan rendah hanya menerima 22,10% jumlah pendapatan, dan pada tahun 1995 naik menjadi 22,65%. Tentunya perubahan ini juga akan merubah besarnya persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan sedang dan 20% yang berpendapatan tinggi. Dalam hal ini pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan menengah yaitu 38,23% pada tahun 1990, naik menjadi 39,68% pada tahun 1995. Pada tahun yang sama yaitu pada tahun 1990, 20% penduduk yang berpendapatan tinggi menerima 39,52% dari jumlah pendapatan turun menjadi 37,77% pada tahun 1995.

Selanjutnya akan diperlihatkan Coefisien Gini untuk Sulawesi Selatan sebagai berikut :

TABEL 5.7
GINI RASIO DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 1990, 1993, 1995 (%)

TAHUN	GINI RASIO	KETIMPANGAN
1990	0,29	Rendah
1995	0,28	Rendah

Sumber : Hasil Pengolahan

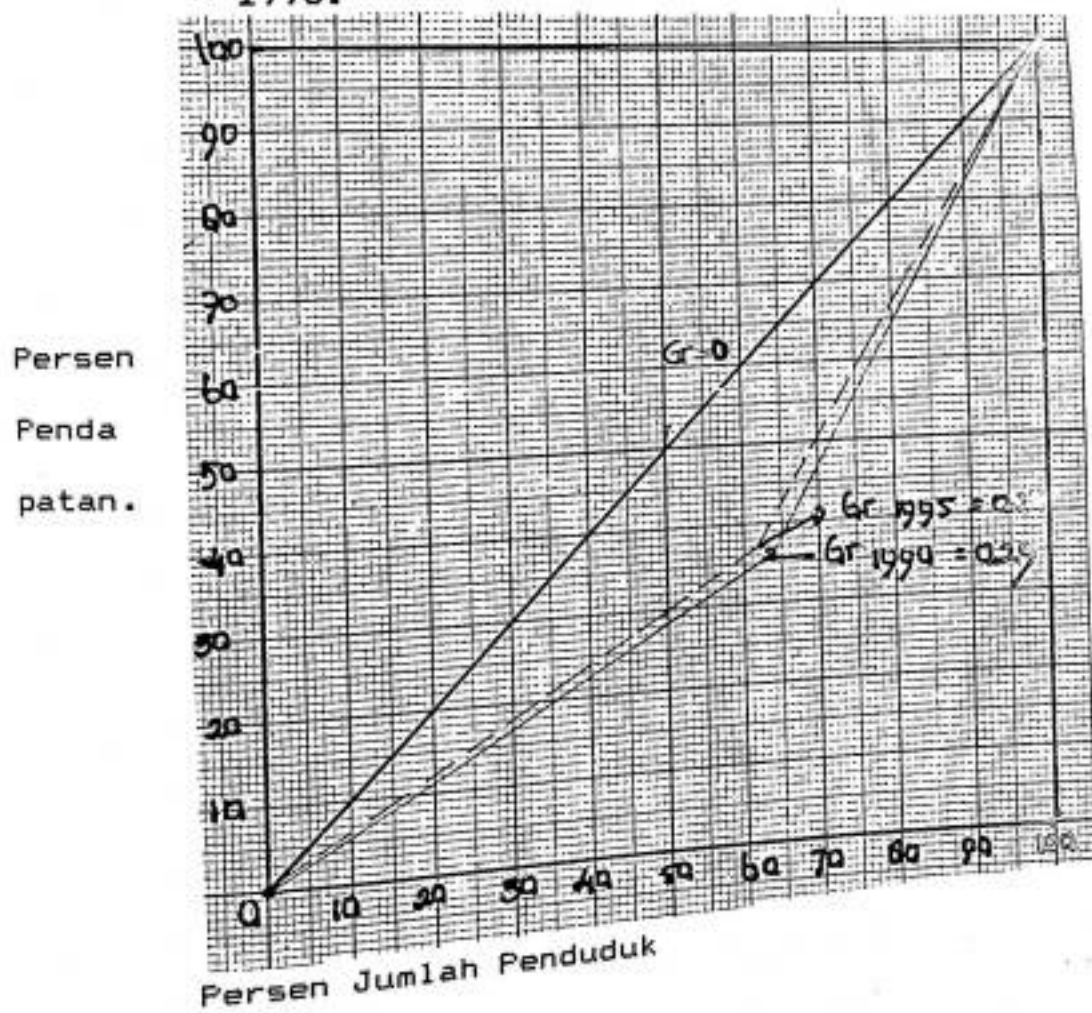
Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pemerataan pendapatan yang diukur berdasarkan besaran Gini Rasio ada suatu kecenderungan bahwa dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya kenaikan pendapatan perkapita telah terjadi pula perbaikan dalam hal pemerataan pendapatan.

Pada tahun 1990 tingkat pemerataan pendapatan berdasarkan besaran gini rasio tercatat 0,29 dan pada tahun 1995 turun menjadi 0,28.

Untuk lebih jelas coefisien gini ini dapat pula digambarkan dalam bentuk grafik yang biasa dikenal dengan nama " Kurva Lorens". Dimana digambarkan hubungan antara persentase penduduk dan persentase pendapatan. Sumbu datar menunjukkan persentase penduduk, sedangkan sumbu tegak menggambarkan persentase pendapatan yang dibagikan. Apabila Kurva berhimpit dengan garis diagonal, maka terjadi pemerataan sempurna atau gini Rasio sama dengan 0 (nol). Garis gini rasio ditentukan oleh luas area dibawah garis diagonal di dalam Kurva, makin luas area tersebut

maka semakin tinggi ketimpangan pembagian pendapatan. Nilai gini rasio itu sendiri adalah hasil pembagian dari luas area antara kurva dengan garis diagonal kemudian dibagi dengan luas segi tiga antara sumbu x dengan garis diagonal.

Gambar I. Kurva Lorens Untuk Sulawesi Selatan Tahun 1990
- 1995.



--- Kurva untuk tahun 1990
.... Kurva untuk tahun 1995

Dari gambar tersebut diatas dapat terlihat bahwa ketimpangan yang terjadi pada tahun 1990 lebih besar di bandingkan dengan tahun 1995, ini berarti bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperlihatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Sebagai bahan perbandingan untuk hasil perhitungan tersebut diatas, maka berikut ini akan diulas beberapa hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dwight King dan Peter Weldon, melakukan perhitungan distribusi pendapatan di daerah Jawa pada tahun 1964-1965, memperoleh angka gini ratio sebesar 0,328 untuk daerah pedesaan, dengan mempergunakan data dari SUSENAS dilihat dari pendekatan pengeluaran. Pada tahun 1969 - 1970 dengan sumber data yang sama, mendapatkan hasil sebesar 0,309 di Daerah pedesaan di Jawa, dan 0,363 di Bandung, Yogyakarta dan Surabaya, kemudian dengan data Survey Biaya Hidup (SBH) menghasilkan angka sebesar 0,392 untuk daerah Jakarta.
- b. Sundrum dengan menggunakan data SUSENAS dari segi pendekatan pengeluaran pada tahun 1964-1969

- memperoleh angka gini ratio sebesar 0,389 untuk Indonesia.
- c. Hendra Esmara dengan data SUSENAS dan Survey Biaya Hidup (SBH) ditinjau dari pendekatan pengeluaran pada tahun 1970 dan 1976 memperoleh angka gini ratio sebesar 0,3265 dan 0,3680 untuk Indonesia perkotaan dan 0,3043 dan 0,3006 untuk Indonesia pedesaan.
- d. Von Guinneker dengan data SUSENAS ditinjau dari segi pengeluaran pada tahun 1969/1970 memperoleh angka gini ratio sebesar 0,341 untuk Indonesia perkotaan dan 0,346 untuk Indonesia pedesaan.
- e. Irland Sujono dan Achmad T. Birowo, dengan data Survey Khusus ditinjau dari pendekatan pendapatan pada tahun 1973/1974 diperoleh angka sebesar 0,495 untuk Jawa tengah daerah pedesaan.
- f. L.N Perera dengan data SUSENAS ditinjau dari pengeluaran pada tahun 1976 diperoleh nilai sebesar 0,3459 untuk Indonesia.
- g. Prasun Sen Gupta dengan Pilot Survey Tenaga Kerja dari segi pendekatan pendapatan pada tahun 1975 memperoleh nilai sebesar 0,59 untuk daerah Jawa dan 0,52 untuk daerah Sumatra Selatan.
- h. Sam. F. Poli dengan data SUSENAS ditinjau dari data pendapatan, memperoleh angka sebesar 0,52 untuk Indonesia, 0,50 untuk Indonesia pedesaan dan 0,49

untuk Indonesia perkotaan. Perhitungan ini dilakukan secara bersamaan pada tahun 1976.

Dari hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para peneliti telah melakukan perhitungan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Dari kedua pendekatan ini telah didapat hasil-hasil yang berbeda pula. pada pendekatan pendapatan mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan angka Coefisien Gini Yang besar , yaitu antara 0,4 sampai 0,5, sedang dengan pendekatan pengeluaran cenderung untuk memperoleh angka yang relatif rendah antara 0,3 sampai 0,4. Terjadinya perbedaan ini, disebabkan karena tidak semua pendapatan tinggi akan dikeluarkan untuk kebutuhan konsumsi. Sebaliknya orang yang berpendapatan rendah akan melakukan pengeluaran untuk konsumsi sebesar pendapatan yang mereka terima.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN



6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisa terhadap hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi selama periode waktu tahun 1989 sampai tahun 1995.

Pada tahun 1990 sebesar 6,74%, tahun 1991 sebesar 9,53%, tahun 1992 sebesar 7,74%, tahun 1993 sebesar 7,72%, tahun 1994 sebesar 7,67% dan tahun 1995 sebesar 8,02%.

Jadi pertumbuhan rata-rata PDRB selama periode tersebut adalah 7,90% pertahun.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Pendapatan Nasional maka pertumbuhan rata-rata PDRB Sulawesi Selatan menunjukkan angka kenaikan rill diatas tingkat pertumbuhan Pendapatan Nasional yang hanya mencapai 7,14% pertahun

Sedangkan pada periode yang sama, pertumbuhan rata-rata pendapatan perkapita di Sulawesi Selatan, secara rill mencapai angka sebesar 6,35% pertahun sedangkan secara nasional mencapai angka sebesar 5,24% pertahun

2. Pertumbuhan rill Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari masing-masing sektor ekonomi periode 1989-1995 memperlihatkan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 37,39%, sektor Bangunan & Konstruksi sebesar 35,48%, sementara sektor pertanian hanya mencapai angka pertumbuhan sebesar 22,01%. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja, ternyata pertumbuhan kesempatan kerja sektor industri hanya mencapai angka -2,14% pertahun, sektor Bangunan dan Konstruksi sebesar 31,21% pertahun dan sektor pertanian sebesar 2,99% pertahun.
3. Elastitas Kesempatan Kerja di Sulawesi Selatan selama periode 1989 - 1995 sebesar 0,39% . Dari 9 (sembilan) sektor ekonomi ternyata sektor Listrik, Gas & Air menempati menempati elastitas kesempatan kerja yang tertinggi yaitu 1,48%, diikuti oleh masing-masing : sektor Pertambangan & Galian , sektor Pertambangan & galian (1,27%), sektor bangunan dan Konstruksi (0,88%), sektor Angkutan dan Konstruksi (0,38), sektor Perdagangan, Restoran & Hotel (0,20%), sektor jasa (0,14%), Sektor Pertanian (0,13%), sektor Industri Pengolahan (-0,06%) dan sektor Bank dan Lembaga Keuangan (-0,20%).

4. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan cukup rendah, dimana 40% penduduk berpendapatan rendah telah menikmati 22,10% dari jumlah pendapatan pada tahun 1990 dan naik menjadi 22,65% dari jumlah pendapatan pada tahun 1995, atau dengan Gini Ratio 0,29 pada tahun 1990 dan turun menjadi 0,28 pada tahun 1995.

6.2 Saran-saran

Dengan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi, maka secara umum akan dikemukakan beberapa saran berikut ini :

1. Melihat sektor pertanian yang masih sangat dominan bagi kegiatan perekonomian bagi kegiatan perekonomian di Sulawesi Selatan dalam pengamatan terjadi penurunan pada periode 1989-1990 dimana tingkat pertumbuhan rata-rata dan elastitas tenaga kerjanya relatif kecil bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Oleh sebab itu pengembangan di sektor ini perlu mendapat perhatian khusus. Dengan kecenderungan sektor pertanian yang mengalami penurunan dan sektor non pertanian yang mengalami peningkatan tersebut, ini menandakan bahwa pada suatu saat struktur perekonomian di Sulawesi Selatan akan mengalami pergeseran dari perekonomian yang bersifat agraris ke Industri-

alisasi. Oleh karena itu, maka kebijaksanaan yang merangsang para pengusaha di luar sektor pertanian perlu pula mendapat perhatian, terutama untuk sektor sekunder dan tertier.

2. Sektor ekonomi atau lapangan usaha yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya dapat pula di usahakan agar dapat pula menciptakan lapangan kerja baru dan untuk lapangan usaha yang pertumbuhannya cukup rendah untuk sementara tidak menerima tidak dibebankan untuk menerima tenaga kerja yang terlalu tinggi.
3. Ketimpangan pembagian pendapatan yang rendah, bukan merupakan suatu kemakmuran karena dapat pula berarti pemerataan kemiskinan, maka peningkatan PDRB dan Pendapatan Perkapita perlu untuk ditingkatkan terus.
4. Bahwa ada kelemahan dan kelebihan yang saling menunjang di antara perhitungan distribusi pendapatan dari segi pendekatan data pengeluaran dan pendekatan data pendapatan pada umumnya mempunyai hasil yang cukup tinggi. Sedangkan dengan pendekatan data pengeluaran menghasilkan ketimpangan yang rendah. Oleh sebab itu sebaiknya perhitungan dengan kedua pendekatan tersebut dilakukan bersamaan dan hasilnya dibandingkan. Apabila hasil dari perhitungan dari sudut pendapatan mendekati

hasil dari perhitungan dengan data pengeluaran, maka hasil dari perhitungan tetap untuk digunakan sebagai ukuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, Arifinal, Ekonomi Produksi, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Armico Bandung, 1994.
- Djojohadikusumo, Sumito, 1974, Ekonomi Pembangunan, Pustaka Ekonomi, Jakarta.
- Dornburch, Rudiger And Stanley Fischer, "Makro Ekonomi", 3rd Editon, Massachusetts Institute of Teknology, Mc Grow Hill, Inc., Diterjemahkan oleh Rudi P. Sitompul Ed., Gunawan Hutahuruk, Erlangga, 1984.
- Esmara, Hendra, Perkiraan Pembagian Pendapatan di Indonesi, Padang : Lembaga Penelitian Ekonomi Regional, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas 1975.
- Indikator Ekonomi Sulawesi Selatan, Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, 1996.
- Jhingan, M.L, 1988, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kadariah, 1984, Analisa Pendapatan Nasional, Bina Aksara, Jakarta.
- Partadidja, Ace, Perhitungan Pendapatan Regional Kotamadya Ujung Pandang, Cetakan Kedua, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerapan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1985.
- Schaltza, 1981, Analisa Pendapatan Nasional, Bina Aksara Jakarta.
- Simanjuntak Payaman J. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985.
- "Statistik Indonesia", Biro Pusat Statistik Jakarta, 1995.
- Suciati, Titi Ekonomi Produksi, Cetakan Pertama, Lumbung

Agung Bandung, 1994.

Sukirno, Sadono, 1990. Ekonomi Pembangunan, Proses Masalah dan Dasar Kebijaksanaan. Borta Jakarta.

Suroso, Ekonomi Produksi, Edisi Pertama, Lumbung Agung Bandung, 1994.

Survey Penduduk Antar Sensus, (SUPAS) Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, 1995.

Team Analisa Data Susena, Distribusi Pendapatan di Indonesia. Biro Pusat Statistik Jakarta : Indonesia, 1994.

Team Pengurus dan Perhitungan Pendapatan Regional Kotamadya Ujung Pandang. Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, 1990.

Todaro, M.P. "Ekonomi Development in The Third World", Longment, Inc., New York, Amerika Serikat, Cetakan Kedua 1978, Diterjemahkan oleh Drs. Aminuddin dan Mursyid.

Triyanto Widodo, HG Suseno, 1990, Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia, Kanksius. Jakarta.

Wahyuni, Meity.S, Ekonomi Produksi, Edisi Pertama, Cetakan Pertama Armico Bandung, 1994.

Winardi, 1983, Pengantar Ilmu Ekonomi, Edisi Ke enam, Tarsito, Bandung.

C. Perhitungan Gini Ratio
 Lampiran 3. Distribusi Pengeluaran Per kapita di Sulawesi Selatan Tahun 1995

1	2	3	4	5	6	7	8
Gol. Pengeluaran/ Kapita/Bulan (000 Rp)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	(%) Penduduk (P _i)	Jumlah seluruh Pengeluaran (000 Rp)	kumulatif Jml Pengeluaran (000 Rp)	(%) (Q _i)	(Q _i +Q _{i-1})	(3x7) Persen
<10	11.738	0,16	620.816	820.816	4,61	4,61	0,7376
10-14.999	99.597	1,33	5.160.533	5.781.349	5,75	10,36	13,7788
15-19.999	449.54	6,00	23.260.600	29.061.949	11,27	17,02	102,12
20-29.999	2.047.666	27,38	106.237.138	135.299.087	21,28	32,55	891,219
30-39.999	1.965.859	26,29	102.007.829	237.306.916	39,67	60,95	1602,37
40-59.999	1.861.003	24,88	96.536.888	333.843.804	60,78	108,45	2499,236
60-79.999	600.063	8,02	31.118.402	364.902.206	71,06	131,84	1057,35
80-99.999	233.370	2,99	11.001.449	375.963.705	82,08	153,14	457,888
100-149.999	172.499	2,31	8.963.031	384.926.736	88,73	170,81	394,571
150-199.999	31.017	0,41	1.590.841	396.517.577	83,28	182,01	75,62
>200	17.116	0,23	892.431	387.410.008	100	193,28	44,4544
TOTAL	7.489.468	100	387.410.008				7,138,331

$$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n P_i(Q_i + Q_{i-1})}{\sum_{i=1}^n P_i Q_i} = 1 - \frac{7.138,331}{10.000} = 1 - 0,7138331 = 0,2862$$

Lampiran 4 : PDRB Sulawesi Selatan Tahun 1989-1995 Menurut Sektor Ekonomi

Lapangan Usaha	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Pertanian	1110431.1	1178872.4	1282530.44	1355977.1	2865648.99	3002814.3	4114756.4
Pertambangan dan Penggalian	61184.26	60372.29	75382.29	78580.04	239882.26	271801.85	227296.19
Industri Pengolahan	196240.88	227639.36	249948.33	299845.02	873227.1	960681.8	1075099
Elektrik, Gas dan Air Panas	3113.45	33774.96	36180.25	38215.91	73044.32	87943.69	87931.53
Retail	99488.18	107002.18	114963.14	124570.71	433501.52	454161	480184.42
Perdagangan, Restoran dan Hotel	443990.64	468251.41	545943.22	595261.29	121610364	1300053.2	1599361.76
Perdagangan dan Komoditas	237047.82	255325.94	272206.02	285964.66	432711.58	492404.24	523967.35
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	156163.1	164252.08	160031.23	163969.47	462233.62	510867.32	542238.52
Lain-lain	272865.18	289113.93	312683.2	387658.52	915388.76	987440.66	1108303.39
Total	2608664.6	2784604.9	3009868.12	3279772.6	751177179	8067368.1	9668048.58

Lampiran 5 : Data Kesempatan Kerja Sulawesi Selatan Tahun 1989 - 1995 Menurut Sektor Ekonomi

Lapangan Usaha	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Pertanian	1194696	1213630	1363832	1374280	1384808	1395417	1406107
Pertanian dan Perikanan	1718	1738	10689	10720	10751	10751	10813
Industri Pengolahan	259685	264201	231339	232771	2342121	2359390	237118
Elektrik, Gas dan Air	958	972	4105	4125	4125	4165	4185
Konstruksi	17587	17873	68270	68581	68869	69208	69573
Perdagangan Restoran dan Hotel	239789	244103	298850	301377	303815	306459	308945
Perhubungan dan Komunikasi	52786	53709	71385	71745	72140	72477	72945
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	7538	7649	5334	5711	5723	5746	5794
Keuangan	221574	255099	277676	279779	279779	281898	284033
Total	1996331	2056967	2331860	2349089	2366460	2383963	2401596



KURVA LORENS UNTUK PROP. SULAWESI SELATAN
TAHUN 1995

